

# MINAT MASYARAKAT ISLAM UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA KEWARISAN KE PENGADILAN AGAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh: Abdul Ghofur Anshori SH, MH

## A. INTISARI

Penelitian ini pada pokoknya bertujuan untuk mengetahui minat masyarakat Islam untuk menyelesaikan perkara kewarisannya ke Pengadilan Agama, khususnya kalau dibandingkan dengan ke Pengadilan Negeri. Kecuali itu, penelitian ini juga berupaya mengungkap faktor-faktor penyebab berminat-tidaknya masyarakat Islam menyelesaikan perkara kewarisannya ke Pengadilan Agama khususnya dan lebih luas lagi ke Pengadilan Negeri. Lebih lanjut juga berusaha mengungkap seluk-beluk praktek fatwa/putusan kewarisan ke Pengadilan Agama di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan angket dan interview. Angket diberikan kepada masyarakat Islam, sedangkan interview (guide) dipersiapkan untuk wawancara dengan para pejabat Pengadilan Agama. Data yang akan diungkap melalui angket berkisar pada pilihan minat masyarakat Islam untuk menyele-

saikan perkara kewarisannya ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Negeri (selanjutnya akan disingkat menjadi PA dan PN), tindakan-tindakan yang akan dilakukan sehubungan dengan pengajuan perkara kewarisannya ke Pengadilan Agama setelah dikeluarkannya fatwa/putusan Pengadilan Agama, faktor-faktor penyebab berminat-tidaknya masyarakat Islam untuk menyelesaikan perkara kewarisannya ke PA, baik dari aspek alasan, kesan maupun kebiasaan yang berlaku di kalangan keluarganya dan masyarakatnya dalam menyelesaikan perkara kewarisannya.

Sedangkan interview guide dipersiapkan guna mengungkap data sekitar; praktek fatwa/putusan PA dalam soal kewarisan, baik yang berkenaan dengan aspek frekuensinya, latar belakang orang yang meminta fatwa, masalah yang diajukan dan prosesingnya.

Setelah data terkumpul, data kuantitatif akan ditabulasi dan dianalisis secara diskriptif persentatif. Sementara data kualitatif akan dianalisis secara deskripsi kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat Islam untuk menyelesaikan perkara kewarisannya ke PA ternyata lebih besar persentasenya dibandingkan dengan yang berminat menyelesaikan ke PN.

## B. LATAR BELAKANG MASALAH

Penyelesaian perkara kewarisan Islam di Indonesia, baik karena adanya persengketaan maupun tidak, ternyata secara hukum khusus di Jawa-Madura masih ditangani oleh PN. Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang. Tetapi dalam praktek masih banyak umat Islam di Jawa-Madura yang atas kehendaknya sendiri menyelesaikan perkara kewarisannya ke PA. Sementara kalau dilihat dasar hukum yang tidak memberikan wewenang kepada PA dalam menyelesaikan perkara kewarisan di lingkup Jawa-Madura adalah produk pemerintah kolonial Belanda (S.1882 No. 152, Jo. S.1937 No.116). Tentunya setelah Indonesia merdeka tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat.

Dalam keadaan dilematis ini perlu adanya kajian khusus mengenai aspirasi masyarakat Islam sendiri sebagai masyarakat yang menjadi bagian bangsa Indonesia dan memiliki kepentingan secara langsung dalam mengurus soal kewarisan.

Di samping itu, di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta menurut informasi yang sempat terpantau menunjukkan bahwa, umat Islam

sangat sedikit yang meminta jasa/-fatwa PA guna menyelesaikan soal kewarisannya (wawancara pribadi dengan Drs. Suharto, Hakim PA Wonosari, tanggal 25 Nopember 1988). Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya kasus yang masuk ke PA. Barangkali hal ini pulalah yang menyebabkan tidak diambilnya Propinsi DIY sebagai lokasi penelitian yang dilaksanakan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum UI pada tahun 1978 dan 1979. Dalam penelitian itu semua propinsi di Jawa --kecuali DIY-- dijadikan daerah penelitian.

Guna mengetahui secara jelas mengenai aspirasi atau minat masyarakat Islam dalam menyelesaikan kewarisannya serta untuk mengetahui kasus-kasus yang terjadi yang sempat ditangani oleh PA dalam soal kewarisan umat Islam, maka menarik untuk meneliti topik tersebut.

Dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada:

1. Bagaimanakah minat umat Islam dalam menyelesaikan soal kewarisannya ke Pengadilan Agama jika dibandingkan dengan ke Pengadilan Negeri di lingkungan DIY?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berminat-tidaknya umat Islam dalam menyelesaikan perkara kewarisannya ke PA?

Dalam hal ini akan difokuskan kepada faktor yang menjadi alasan sehingga umat Islam ber-

minat menyelesaikan perkara kewarisannya ke PA maupun ke PN, kesan mereka terhadap PA.

3. Bagaimanakah praktek fatwa PA dalam soal kewarisan umat Islam?

Untuk ini akan diarahkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan frekuensi, latar belakang orang yang mengajukan masalah yang diajukan dan prosesing pelaksanaannya.

### C. TINJAUAN PUSTAKA

Pengadilan Agama di Indonesia mempunyai rentetan dasar hukum yang secara sederhana disepakati keberadaannya mulai pada tahun 1882 yaitu dengan ditetapkannya S.1882 No. 152. S.1882. No. 152 ini mengatur tentang PA dan MIT untuk lingkup Jawa-Madura khususnya. Kemudian masih dalam masa pemerintahan kolonial Belanda ditetapkan lagi S.1937 No. 638, 639 yang mengatur "Kerapatan Qadli" dan Kerapatan Qadli Besar untuk sebagian Kalimantan Selatan. Akhirnya setelah masa Orde Baru tegak ditelorkan UU No. 14/1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, di mana PA benar-benar berada seiring dengan pengadilan lainnya (Departemen Agama, 1980/1981: 1-2).

Walaupun demikian, harus diakui bahwa, kompetensi PA di tiap daerah masih berbeda khususnya dalam penanganan bidang kewarisan. Pengadilan Agama di Jawa-Madura tidak mempunyai wewenang dalam mengurus soal kewarisan (pa-

sal 2a S.1882 No. 152). Dalam makna kata, putusan perkara kewarisan menjadi wewenang Pengadilan Negeri (Notosusanto, 1963: 32).

Kendatipun PA di Jawa-Madura tidak mempunyai wewenang dalam mengurus soal kewarisan, akan tetapi dalam prakteknya, PA di lingkungan Jawa-Madura selain menyelesaikan perkara yang menjadi wewenangnya selama ini yaitu, urusan nikah, talak, ruju', dan perceraian orang-orang Islam (H. Imam Anis, 1985: 133), juga menyelesaikan hal-hal yang erat kaitannya dengan Agama Islam sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan atas kehendak umat Islam sendiri, walau hanya terbatas pada pemberian fatwa (Djamil Latif, 1983: 45), misalnya yang dilakukan PA DKI yang juga mengurus soal kewarisan. Hal ini karena banyaknya umat Islam yang meminta bantuan kepada PA untuk menyelesaikan perkara kewarisannya. Bahkan berdasarkan pengamatan Daniel S. Lev, di Indonesia ternyata PA lebih banyak menerima perkara kewarisan dari umat Islam dibandingkan dengan PN (Daniel S, Lev, 1977: 270).

Sementara itu, berdasarkan penelitian yang diadakan BPHN mengenai kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku dewasa ini, yang diadakan pada tahun 1978 dan 1979 di Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, NTB, ternyata sebagian besar umat Islam menyelesaikan perkara kewarisannya ke PA dan

hanya sedikit yang menyelesaikan ke PN langsung (BPHN, 1978, 1979). Dalam penelitian yang diadakan BPHN tersebut, Propinsi DIY tidak diambil atau dijadikan sebagai daerah penelitian.

Minat merupakan kecenderungan bertingkah-laku yang terarah terhadap obyek, kegiatan atau pengalaman tertentu. Kecenderungan itu berbeda dalam integritasnya pada setiap orang (Ensiklopedi Indonesia, 1984:2684). Dengan demikian, konsep minat mengandung unsur tindakan pengambilan keputusan yang *akan* dilakukan atau *tidak akan* dilakukan. Kaitannya dengan judul ini berarti tindakan masyarakat Islam untuk mengambil keputusan akan atau tidak akan menyelesaikan perkara kewarisannya ke PA. Artinya, tindakan seseorang itu belum sampai pada tingkat pelaksanaan tetapi masih pada taraf niat.

Kecenderungan seseorang untuk melakukan atau tidak akan melakukan sesuatu didorong oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut datangnya dapat dari individu juga dapat dari luar individu. Faktor dari dalam misalnya, pengetahuan dan kesan individu tentang wewenang dan status PA dan PN dalam menyelesaikan perkara kewarisan. Begitu pula dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan individu (Singgih Dirgagunarsa, 1983:92). Seseorang akan berniat atau tidak akan berniat menyelesaikan perkara kewarisannya ke PA melihat apakah dengan mengajukan ke PA

akan membawa manfaat atau tidak bagi kepentingan dan kebutuhannya.

Faktor yang datangnya dari luar individu yaitu, faktor yang disebabkan pengaruh dari luar terhadap seseorang sehingga terdorong berniat atau tidak berniat, seperti faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati (Gerungan: 1983: 62-74), dan faktor sosialisasi (Mar'at, 1981: 15). Adanya orang lain yang dihormati dan disegani dalam melakukan/menyelesaikan soal kewarisan ke PA atau PN akan mempengaruhi pula terhadap seseorang untuk melakukan (melalui identifikasi, imitasi, sugesti). Begitu pula adanya kesan simpati terhadap PA atau PN akan mendorong berniat-tidaknya seseorang. Adanya proses pemasyarakatan melalui berbagai media seperti pengajian, penerangan, penyuluhan dan sebagainya mengenai baik-tidaknya, cepat-tidaknya dan mudah-tidaknya dalam menyelesaikan kewarisan di PA dan PN akan ikut mempengaruhi timbulnya keputusan berminat-tidaknya seseorang menyelesaikan perkara kewarisan ke PA.

### D. METODOLOGI PENELITIAN

#### 1. Teknik Pengumpul Data

- Angket, guna mengungkap data dari umat Islam di lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang akan diperoleh ialah mengenai seluk-beluk berminat-tidaknya umat Islam untuk menyelesaikan perkara

kewarisannya ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

- b. Wawancara, digunakan untuk mengungkap data tentang; praktek fatwa dalam soal kewarisan dari pejabat Pengadilan Agama, baik yang menyangkut frekuensinya, latar belakang orang yang mengajukan, masalah yang diajukan, dan yang menyangkut prosesnya.

## 2. Penentuan Lokasi

Daerah penelitian akan diambil 3 Dati II yaitu Kodya Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Oleh karena setiap Dati II itu membawahi beberapa kecamatan, maka pada setiap Dati II tersebut akan diambil 1 kecamatan kota dan 1 kecamatan luar kota. Pemilihan dilakukan secara purposive sampel. Selanjutnya dari tiap kecamatan kota dan luar kota akan diambil 2 kelurahan. Penentuan kelurahan diambil secara purposive non random. Ciri-ciri kelurahan yang akan dijadikan lokasi yaitu kelurahan yang masyarakatnya 'dianggap' tergolong taat dalam melaksanakan ajaran agama dan kelurahan yang masyarakatnya 'dianggap' tergolong kurang taat melaksanakan ajaran agama. Penentuan ciri-ciri itu hanya akan didasarkan atas kesan secara umum dari beberapa orang/pejabat kecamatan. Setelah melalui proses, maka lokasi penelitiannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. *Kodya Yogyakarta*  
Kecamatan kota Gondomanan,

kelurahan yang diambil Ngupasan dan Prawirodirjan. Sedangkan kecamatan luar kota Tegalrejo meliputi kelurahan Tegalrejo dan Karangwaru.

- b. *Kabupaten Sleman*  
Kecamatan kota Sleman dengan sampel kelurahan terdiri dari Kelurahan Trimulyo dan Triharjo. Kecamatan luar kota Kalasan, dengan sampel kelurahan terdiri dari Kelurahan Purwamartani dan Tirtomartani.
- c. *Kabupaten Bantul*  
Kecamatan kota yaitu Bantul dengan sampel kelurahan terdiri dari Kelurahan Bantul dan Sabdodadi. Sedangkan kecamatan luar kota yaitu Banguntapan dengan sampel kelurahan terdiri dari Kelurahan Singosaren dan Banguntapan.

Selain lokasi penelitian tersebut, penelitian ini juga diadakan di Pengadilan Agama di ketiga Dati II yaitu PA Kodya Yogyakarta, PA Kabupaten Sleman dan PA Kabupaten Bantul.

## 3. Penentuan Subyek

Responden dalam penelitian ini ialah ummat Islam yang telah berkeluarga dan minimal berpendidikan tingkat dasar. Jumlahnya hanya akan diambil 300 responden. Tekniknya 'proportional-stratified random sampling'. Strata responden akan digolongkan ke dalam 5 jenis yaitu; ummat Islam yang menjadi pejabat tingkat kelurahan, pejabat agama tingkat kecamatan, tokoh

agama, tokoh masyarakat, dan ummat Islam kebanyakan.

Informan dalam penelitian ini ialah pejabat Pengadilan Agama di ketiga Dati II yang benar-benar mengerti seluk-beluk tentang praktek fatwa kewarisan di Pengadilan Agama setempat.

## 4. Analisis Data

Untuk data kuantitatif akan disajikan dalam bentuk tabel dan akan dianalisis secara diskripsi persentatif. Sementara untuk data kualitatif akan dianalisis secara diskripsi-kualitatif.

## E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan berikut hanya akan difokuskan pada aspek-aspek pilihan minat ummat Islam dalam menyelesaikan soal kewarisannya ke PA dan PN, faktor berminat-tidaknya ke PA, dan praktek fatwa di Pengadilan Agama.

### 1. Pilihan Minat Menyelesaikan soal Kewarisan ke PA dan PN.

Islam mengajarkan agar ummatnya memeluk agama Islam secara 'kaffah'. Pelaksanaan ajaran agama bukan saja harus dalam aspek ibadah dalam arti sempit, tapi juga dalam aspek muammalah khususnya sub aspek kewarisan. Supaya prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam berjalan dengan baik, maka di Indonesia sebagai negara yang berdasar Pancasila dan sebagai negara hukum perlu diadakan lembaga peradilan yang khusus mena-

ngani soal kewarisan ummat Islam tersebut. Dengan demikian sudah seharusnya jika ummat Islam menyelesaikan perkara kewarisannya ke PA. Hal ini supaya dalam penentuan ahli waris dan bagiannya sesuai dengan ajaran Islam.

Sementara hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari 285 responden yang menjawab seperti tercantum dalam tabel 1, ternyata minat ummat Islam menyelesaikan perkara kewarisannya ke PA hanya mencapai 56,1%. Sedangkan yang berminat ke PN mencapai 43,9%. Ini berarti walaupun yang berminat ke PA relatif sedikit, tetapi kalau dibandingkan dengan yang berminat ke PN persentasenya masih lebih besar. Hasil penelitian ini kalau dibandingkan dengan hasil penelitian BPHN yang bekerja sama dengan FH UI pada tahun 1978 dan 1979, persentasenya sangat berbeda. Sebab hasil penelitian BPHN tahun 1978 mencapai 77,2%, dan pada tahun 1979 sebesar 68,3% yang berminat ke PA.

Sementara kalau dilihat dari tempat tinggal per kabupaten/kodya (lihat tabel 1) menunjukkan bahwa, responden di ketiga Dati II yang berminat menyelesaikan ke PA persentase terbesar terdapat di Kodya Yogyakarta (61,7%) dibandingkan dengan responden di Kabupaten Sleman (53,8%) dan Kabupaten Bantul (53%). Sebaliknya responden yang menyelesaikan ke PN persentase terbesar terdapat di Kabupaten Bantul (47%) dibandingkan di kabupaten Sleman (46,2%) dan

Kodya Yogyakarta (38,3%). Data ini menunjukkan pula bahwa, di ketiga Dati II responden lebih banyak yang berminat menyelesaikan ke PA dibandingkan dengan yang berminat ke PN, dengan sifat persentase yang berbeda. Di Kodya Yogyakarta persentasenya jauh berada di atas persentase responden secara keseluruhan (Propinsi DIY). Sedangkan di Kabupaten Sleman dan Bantul berada di bawah persentase responden secara keseluruhan (Propinsi DIY). Di Kodya Yogyakarta meskipun persentase yang berminat ke PA berada jauh di atas responden keseluruhan di Propinsi DIY, namun masih berada di bawah persentase yang diperoleh dari hasil penelitian BPHN pada tahun 1978 maupun pada tahun 1979.

ponden wanita (63,8%) lebih besar dibandingkan dengan responden laki-laki (54,6%) yang berminat ke PA.

Dilihat dari status sosial responden menunjukkan bahwa, responden yang berstatus pejabat tingkat kelurahan lebih separuh (55%) berminat ke PN dan hanya 45% yang berminat ke PA. Hal ini berbeda dengan keempat kelompok sosial lainnya yang cenderung berminat menyelesaikan ke PA; walaupun persentase di tiap kelompok berbeda. Responden pejabat agama tingkat kecamatan sebagian besar (80%) berminat ke PA. Demikian pula responden tokoh masyarakat sebagian besar (65,5%) berminat ke PA, responden tokoh agama bahkan mencapai 81,8% yang berminat

**Tabel 1:** Minat Menyelesaikan Kewarisan ke PA dan PN dilihat dari Dati II Responden (N = 285)

Pengadilan	Bantul		Sleman		Yogya		DIY	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Peng. Agama	53	53,0	49	53,8	58	61,7	160	56,1
Peng. Negeri	47	47,0	42	46,2	36	38,3	125	43,9
Jumlah	100	100%	91	100%	94	100%	285	100%

Sumber: Data Primer, 1989

Dilihat dari segi seks, responden wanita dan laki-laki lebih banyak yang berminat menyelesaikan ke PA dibandingkan yang berminat ke PN. Hanya saja persentase, res-

ponden wanita (63,8%) lebih besar dibandingkan dengan responden laki-laki (54,6%) yang berminat ke PA.

Dalam suatu putusan pengadilan --apalagi yang hanya berupa fat-

wa-- seorang pengaju perkara dapat menerima juga menolak. Kalau seorang tidak puas cenderung akan menolak, sebaliknya jika telah sesuai dengan tuntutan cenderung akan menerima. Dalam kaitan ini, kalau responden tidak puas terhadap fatwa kewarisan dari PA karena beberapa sebab seperti merasa bagian yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginannya kebanyakan (40%) menyatakan akan mengajukan ke PN, responden yang lain menyatakan akan mematuhi juga walaupun dengan berat hati (31,2%). Selebihnya akan mengambil sikap diam saja (11,9%) dan menjawab lain-lain (16,9%) misalnya akan tetap mematuhi dengan lapang dada karena fatwa PA akan sesuai dengan ajaran Islam, ada yang menyatakan akan naik banding ke peradilan agama yang lebih tinggi, akan mencari dalil hukum agama yang lebih kuat daripada fatwa yang diberikan PA, dan akan memusyawarahkan lagi dengan keluarga.

Sementara itu, karena fatwa PA dalam kewarisan tidak mengikat atau tidak mempunyai kekuatan hukum khususnya di Jawa-Madura, maka kemungkinan untuk tidak dipatuhinya fatwa yang dikeluarkanya besar sekali, namun dapat juga karena faktor-faktor tertentu misalnya pegangan nilai keislaman yang cukup kuat pada seseorang, maka fatwa PA tersebut akan dipatuhi secara ikhlas. Sehubungan dengan hal ini ternyata sebagian besar responden (68,1%) menyatakan tetap akan mematuhi karena landasan nilai

agama yaitu karena fatwa PA sudah pasti sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Hanya sedikit (16,9%) responden yang menyatakan akan tetap mematuhi dengan alasan teknis yaitu karena sebagai akibat pengajuan perkaranya ke PA. Sedangkan mereka yang menyatakan belum tentu mematuhi persentasenya kecil sekali (5,6%). Sisanya menjawab lain-lain (9,4%).

Sebagai konsekuensi logis sikap patuh-tidaknya responden terhadap fatwa PA dapat berupa pengambilan sikap meminta-tidaknya pengu-kuhan dari PN bagi perkara kewarisannya yang telah dikeluarkan PA. Seorang yang mempunyai keyakinan bahwa PA fatwa PA sebagai realisasi ajaran Islam dan akan sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang harus dipatuhi, maka kemungkinan terbesar akan mencukupi pada fatwa PA tanpa perlu mengukuhkannya ke PN. Berdasarkan hasil penelitian ternyata cukup positif, sebab sebagian besar (73,1%) responden menyatakan akan mencukupkan diri pada fatwa PA dan tidak akan mengukuhkannya ke PN. Hanya sebagian kecil (26,9%) yang menyatakan tetap akan mengajukan ke PN untuk dikukuhkan. Keadaan ini nampak berbeda dibandingkan hasil penelitian BPHN. Hasil penelitian BPHN baik tahun 1978 maupun 1979 persentasenya justru lebih rendah. Pada tahun 1978 mencapai 57,2%, bahkan pada tahun 1979 hanya mencapai 53,7% yang menyatakan hanya mencukupkan diri pada fat-

wa PA.

## 2. Faktor-faktor Berminat-tidaknya Penyelesaian Perkara Kewarisan ke PA.

### a. Faktor alasan berminat

Minat akan sesuatu dipengaruhi faktor dalam dan luar. Faktor dalam dapat bersifat aspek idealistik misalnya karena adanya dorongan menjalankan agama secara *kaffah* termasuk dalam menjalankan hukum kewarisan Islam dan karena lembaga peradilan yang dianggap dapat memberikan fatwa kewarisan secara islamis adalah PA, maka timbul kemauan pada seseorang untuk menyelesaikan perkaranya ke PA. Demikian pula dapat berupa dorongan supaya PA dapat mengurus soal kewarisan umat Islam yang secara yuridis formal (khusus di Jawa-Madura) belum punya wewenang. Adanya minat menyelesaikan perkara kewarisan ke PA dapat juga disebabkan fatwa PA akan memenuhi rasa keadilan menurut pemahaman (keagamaan) seseorang. Juga dapat bersifat teknis misalnya karena kemudahan mengurus (faktor luar). Semua faktor tersebut akan nampak melalui alasan mengapa seorang berminat menyelesaikan ke PA. Hasil penelitian dalam soal ini menunjukkan, sebagian besar (61,9%) responden beralasan karena PA sudah sepantasnya mengurus soal kewarisan Ummat Islam. Jadi menyangkut aspek yuridis formal yaitu karena PA selama ini (di Jawa-Madura) tidak punya wewenang. Sementara itu, respon-

den yang beralasan karena fatwa yang akan dikeluarkan PA dapat memenuhi rasa keadilan hukum dibandingkan dengan putusan PN mencapai 25%. Sedangkan yang menjawab lain-lain (12,5%) menjawab karena faktor keyakinan keagamaan bahwa PA akan memberikan fatwa yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Responden yang beralasan faktor teknis yaitu karena kemudahan mengurus persentasenya hanya 0,6%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor berminatnya responden untuk menyelesaikan perkara kewarisannya ke PA disebabkan faktor idealistik, baik karena bersifat keagamaan maupun tinjauan yuridis formal.

### b. Faktor kesan terhadap PA

Kesan dan pengetahuan seseorang tentang sesuatu akan mempengaruhi pula terhadap minat akan sesuatu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 23,5% responden memiliki kesan positif terhadap keberadaan PA yaitu mereka yang menyatakan PA perlu dikembangkan sangat penting untuk mengurus soal kewarisan umat Islam. Di samping itu ada yang telah memiliki kesan positif bahwa PA karena saat ini belum memiliki wewenang mengurus soal kewarisan, maka sangat perlu untuk diberikan wewenang (10,9%), dan responden yang memiliki kesan bahwa PA selama ini hanya mengurus soal perkawinan perlu diluaskan wewenangnya (4,5%). Yang cukup menarik adalah begitu

besarnya persentase responden yang menjawab lain-lain (43,9%). Terakhir ada responden yang menjawab di luar keempat aspek seperti tersebut (kurang 2%). Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa urutan kesan terhadap PA yaitu:

Pertama, PA belum mempunyai wewenang mengurus soal kewarisan walaupun begitu sangat diperlukan dalam mengurus soal kewarisan umat Islam. Kedua, PA hanya mengurus persoalan di luar kewarisan dan untuk itu tetap perlu dipertahankan dan dikembangkan. Ketiga, PA belum banyak dikenal dalam mengurus kewarisan. Keempat, PA tidak punya wewenang mengurus soal kewarisan.

Masih bervariasi kesan responden ini terhadap keberadaan dan fungsi PA inilah yang menyebabkan masih sedikitnya persentase responden untuk berminat menyelesaikan perkara kewarisannya ke PA.

### c. Faktor kebiasaan menyelesaikan perkara kewarisan

Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat untuk memecahkan soal kewarisan juga akan mempengaruhi minat seorang menyelesaikan kewarisannya ke PA maupun ke PN. Hal ini berkaitan erat dengan budaya masyarakat Indonesia khususnya Jawa yang lebih banyak mencari jalan damai/musyawarah secara kekeluargaan dalam menyelesaikan soal kehidupan khususnya yang berkenaan dengan kehidupan

rumah tangga termasuk soal kewarisan. Hal ini terbukti pula dari hasil penelitian ini. Banyak (38,9%) responden yang menyatakan bahwa di lingkungan keluarga mereka jika menyelesaikan soal kewarisan hanya terbatas di antara keluarga sendiri. Hasil ini juga tidak terlalu jauh berbeda dengan hasil penelitian BPHN, baik hasil tahun 1978 (34%) maupun tahun 1979 (46,1%). Ada 17,9% menyatakan diselesaikan di antara keluarga dengan melibatkan tokoh agama. Ini berarti berada di bawah persentase hasil penelitian BPHN yang mencapai 29,5% (1978) dan 26,5% (1979).

Sebesar 16,8% menyatakan keluarga mereka menyelesaikan di kalangan keluarga dengan melibatkan tokoh masyarakat. Hasil ini jika dibandingkan dengan hasil BPHN tahun 1978 masih lebih besar (9,3%), tetapi dibanding hasil tahun 1979 sedikit berada di bawahnya (21,8%).

Sementara responden yang menyatakan bahwa keluarga mereka biasanya menyelesaikan perkara kewarisannya ke Pengadilan persentasenya sangat kecil. Pengajuan ke PA hanya mencapai 1,7% dan ke PN hanya 2,5%. Di samping itu banyak pula yang menjawab lain-lain (22,1%) yang pada intinya tidak mengajukan ke pengadilan tetapi diselesaikan dengan melibatkan pamong desa.

Sementara itu kalau melihat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tempat tinggal responden, keadaannya hampir sama dengan



kebiasaan di lingkungan keluarga responden sendiri. Artinya dalam menyelesaikan soal kewarisan sebagian besar dilakukan di luar lembaga peradilan, tetapi lebih banyak diselesaikan di antara keluarga sendiri dengan melibatkan pihak ketiga baik dari kalangan tokoh agama maupun dari tokoh masyarakat dan pamong desa/kelurahan.

### 3. Praktek Fatwa Kewarisan di Pengadilan Agama di lingkungan Propinsi DI Yogyakarta

Frekuensi perkara kewarisan yang masuk ke PA di lingkungan Dati II Propinsi DIY sangat sedikit. Di ketiga Dati II yang dijadikan lokasi penelitian, frekuensi terbanyak terdapat di PA Kodya Yogyakarta. Selama 12 bulan terakhir perkara yang masuk dan dapat diselesaikan mencapai 8 perkara. Hal ini berbeda sekali dibanding kedua kabupaten. Kabupaten Sleman hanya menerima 6 perkara selama 5 tahun terakhir (ini pun separuhnya hanya bersifat pemberian petunjuk lisan). PA Kabupaten Bantul jumlah perkara yang masuk --baik bersifat tertulis/-penyidangan maupun petunjuk lisan-- juga mencapai 6 perkara selama 5 tahun terakhir.

Dilihat dari sekse pemohon, antara pemohon laki-laki dan wanita hampir sama. Status pemohon kebanyakan sebagai anak kandung dan janda mati. Tempat tinggal pemohon sebagian besar berasal dari daerah luar kota di samping ada juga yang dari daerah perkotaan.

Adapun masalah yang diaju-

kan semuanya berkisar pada 2 hal yaitu mengenai penentuan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris tersebut.

Praktek penyelesaian kewarisan yang dilakukan PA di ketiga Dati II sebagian besar berupa pemberian fatwa dan hanya satu perkara yang berupa putusan. Lamanya waktu baik fatwa melalui penyidangan maupun putusan ada perbedaan di ketiga Dati II. Waktu terlama terdapat di PA Kodya Yogyakarta (37-60 hari), dan waktu tercepat terdapat di PA Kabupaten Sleman. Kendatipun demikian tidak semua fatwa memakan waktu seperti di atas di tiap Dati II.

Seperti disinggung di atas, di ketiga Dati II ternyata dikenal 2 jenis fatwa yaitu di samping fatwa secara tertulis atau melalui penyidangan, juga dikenal fatwa secara lisan. Fatwa lisan ini biasanya diberikan langsung ketika pemohon meminta fatwa secara lisan. Hal ini cukup praktis baik dari segi biaya, waktu dan tenaga. Apalagi kalau diingat bahwa meskipun dengan pemberian fatwa lisan ternyata pemohon tetap melaksanakan isi fatwa lisan itu.

Prosedure dan persyaratan permohonan fatwa/putusan di ketiga Dati II terdapat kesamaan yaitu permohonan diharuskan membuat surat permohonan untuk didaftar. Surat permohonan itu harus disertai dengan persyaratan administratif lainnya, antara lain: surat kuasa (bagi pemohon yang mewakili), surat ke-

terangan pemberian kuasa dari ahli waris yang lain, surat keterangan kematian dari aparat RT, kelurahan dan kecamatan. Juga dari rumah sakit kalau ada, surat keterangan nikah, akte kelahiran dan KTP. Setelah surat permohonan didaftar selanjutnya pemohon tinggal menunggu panggilan sidang.

Mengenai besarnya biaya di ketiga Dati II berbeda. Hal ini disebabkan perbedaan kebutuhan dan keadaan pada masing-masing PA, juga tergantung pada banyaknya penyidangan. Misalnya biaya untuk Kas Negara di PA Kodya Yogyakarta dan Sleman lebih tinggi dibanding PA Bantul. Begitu pula dengan biaya Redaksi, di Kabupaten Bantul lebih murah.

### F. KESIMPULAN

1. Minat menyelesaikan perkara kewarisan ke PA dari umat Islam di DIY hanya mencapai 56,1%. Walaupun demikian persentasenya sudah lebih besar dibandingkan umat Islam yang berminat menyelesaikan ke PN.
2. Faktor yang menjadi alasan umat Islam DIY berminat menyelesaikan perkara kewarisannya ke PA sebagian besar disebabkan adanya keyakinan bahwa PA memang sudah sepantasnya mengurus soal kewarisan umat Islam, kendati pun PA di Jawa-Madura sampai saat ini belum memiliki wewenang.

Kesan masyarakat Islam me-

ngenai PA berkisar pada kenyataan bahwa PA tidak punya wewenang mengurus kewarisan. Walaupun demikian menurut mereka sangat perlu bagi PA untuk mengurus kewarisan umat Islam sebagaimana dikemukakan dalam faktor yang menjadi alasan.

Faktor berminat-tidaknya umat Islam menyelesaikan perkara kewarisannya ke pengadilan khususnya PA, juga disebabkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat (Islam) Jawa, di mana dalam menyelesaikannya dilakukan di antara keluarga mereka sendiri dan terkadang dengan melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama atau pamong desa secara musyawarah. Hanya sedikit sekali yang menyelesaikan ke PA.

3. Frekuensi perkara yang masuk ke PA di Dati II DIY mengenai soal kewarisan sangat sedikit. Hampir semua perkara kewarisan yang ditangani PA terbatas pada pemberian fatwa bukan putusan. Dalam pemberian fatwa ada yang melalui penyidangan juga ada yang secara lisan. Kebanyakan pemohon berstatus anak kandung dan janda mati yang datang dari daerah perkotaan dan banyak yang dari luar perkotaan. Masalah yang diajukan berkisar pada penentuan ahli waris dan bagiannya.

## G. KEPUSTAKAAN

Ali, HM. Daud. *Peranan Peradilan Agama di Indonesia*, Makalah. Jakarta: 1982.

Ash-Shiddiqi, TM. Hasbi. *Peradilan Agama dan Hukum Acara Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1981.

Departemen Agama, *Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan Agama*. Jakarta: 1980/-1981.

Dirgagunarsa, Singgih. *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Mutiara, 1983.

*Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru-Vanloeeve dan Els-

ver Publishing Projects, 1984, volume 4.

Gerungan. *Psikologi Sosial*. Bandung-Jakarta: Eresco, 1983.

Latief, HM. Djamil. *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Lev, Daniel S. *Islamic Courts in Indonesia*. Berkeley, 1977.

Mar'at. *Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Notosusanto. *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah-mada, 1975.

BPHN. *Kaidah-kaidah Hukum Islam yang Berlaku Dewasa ini*. Laporan penelitian. Jakarta: 1978, 1979.